

Daftar Isi

Dinamika Agresi Pascakonflik: Persepsi Agresif Etnis Madura dengan Latar Belakang Pengalaman yang Berbeda : <i>Taufik</i>	1 - 8
Analisis Sektor Unggulan, Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus Sumatera Barat Tahun 1987-2002 : <i>Fery Andrianus- Muhammad Said</i>	9 - 17
Implementasi Manajemen Agribisnis pada Usahatani Ternak Itik (Studi Kasus pada KTTI Sri Rejeki, Pemalang) : <i>Titik Ekowati, Edy Prasetyo, Mukson</i>	18 - 24
<i>Impeachment</i> Presiden dalam <i>Check and Balances System</i> di Indonesia : <i>Untung Sri Hardjanto</i>	25 - 31
Demokrasi Pancasila dalam Upaya Menuju Masyarakat Madani : <i>Muzayannah</i>	32- 41
Karakteristik Sosial Ekonomi Demografi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja di Kecamatan Gunungpati Semarang : <i>Wyati Saddewisasi, Eddy Sutjipto</i>	42 - 54
Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia : <i>Doddy Kridasaksana, Amri Panahatan, A. Heru Nustwanto</i>	55 - 59
Kajian Pola Kemitraan Usaha Ayam Broiler di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman : <i>Syafril, Ika Desma Yanti</i>	60- 66
Menguatkan Keterwakilan Politik : Tinjauan Kritis terhadap Dewan Perwakilan Daerah : <i>Arief Hidayat</i>	67 - 73
Efektivitas Komunikasi sebagai Penunjang Kepuasan Pelanggan : <i>Hardani Widhiastuti</i>	74 - 79
Ilmu dan Ideologi (Suatu Kajian Sosiologis Keilmuan) : <i>Iriyanto Widisuseno</i>	80 - 84
Strategi Penawaran Barang dan Jasa bagi Pelaku Kegiatan Perdagangan dan Jasa Tradisional di Sekitar Pusat Perbelanjaan Java Supermall, Suatu Studi Kasus) : <i>Paulus Hariyono</i>	85 - 93

Jurnal **DINAMIKA SOSIAL BUDAYA**

(Journal of Social and Cultural Dynamics)

Terakreditasi Dirjen Dikti No. 34/DIKTI/Kep/2003

Volume 8 Nomor 1, Juni 2006
ISSN 1410-9859

- Penanggung Jawab : Rektor Universitas Semarang
Ir. Imam Soewadi, Dipl.H.E.
- Mitra Bestari : *Prof. Dr.H. Muladi, SH*
Prof. Dr. Miyasto
Prof. Abdullah Kelib, S.H
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, S.E., M.E.
Prof. Ir. Sunarso, MS., Ph.D
Dr. Nugroho, M.Psi
Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si
- Redaksi Pelaksana
- Ketua : *Dr Ir. Priyantini Widyaningrum, M.S*
- Wakil Ketua : *Ir. Kusrahayu, M.Sc*
- Sekretaris : *Adijati Utammingsih, S.E., M.M.*
- Anggota : *Efi Yulistiowati, S.H., M.Hum*
Noori Qonitatin, S.Psi
- Administrasi : *Moch. Sofijar Hadijanto, SE*

Dinamika Sosbud	Vol. 8	No.1	Hlm. 1- 93	Semarang Juni 2006	ISSN 1410-9859
--------------------	--------	------	------------	-----------------------	-------------------



Penerbit:

Lembaga Penelitian Universitas Semarang

Alamat:

Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang 50196

Telp. 024-6702757 ext. 116; Fax. 024-6702272

e-mail: lemlitum@yahoo.com

ILMU DAN IDEOLOGI : SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS KEILMUAN

(Science and Ideology : A Study of Scientific Sociologies)

Iriyanto Widisuseno

UPT MKU Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRACT

The scientific development nowadays are very quickly. On the other hand, every nation on the world have been protected his ideology. These both have an existence characteristics, and on their historical development are always contradiction. The scientific sociological approach as one alternative solution to compromise these contradiction, these both can do the social demand supporting.

Keywords: science, ideology, scientific sociological

PENDAHULUAN

Ilmu dan ideologi merupakan dua entitas yang selalu bertentangan dalam cara beradanya, meskipun masing-masing mengklaim dirinya berkomitmen pada prinsip kebenaran. Sebagai entitas yang dipertentangkan, ilmu mengklaim dirinya otonom, netral, dan bebas dari nilai, sedangkan ideologi mengklaim dirinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tunduk pada pranata sosial. Ilmu pengetahuan selalu menjaga otonominya demi kebenaran ilmiahnya. Ideologi selalu menjaga soliditas dan validitas sistem nilainya dengan kepentingan masyarakat. Sebagai entitas yang perlu dikompromikan, keduanya berorientasi pada kebenaran, meskipun masing-masing sifat kebenarannya berbeda. Ilmu pengetahuan berorientasi pada kebenaran ilmiah, dan ideologi berorientasi pada kebenaran yang ditentukan oleh pandangan dunia.

Ketegangan memang tak dapat disangkal antara ilmu dan ideologi. Ideologi adalah dalam arti luas, yaitu setiap

perangkat ide yang bersifat mengarahkan, maka istilah ideologi tidak perlu berarti negatif. Ada macam-macam ideologi atau ide yang menonjol: agamawi, metafisis, susila, sosial dan politis.

Ketegangan pertama-tama terjadi antara ilmu dan agama. Dalam masyarakat yang disebut primitif, dicirikan oleh pola kebudayaan yang sering amat majemuk, mitos, dan upacara sekaligus berfungsi sebagai agama. Mitos menyediakan cerita, bimbingan hidup, hubungan dengan "sang adikodrati". Ilmu modern meresap kemana-mana. Kerap kali menunjang kesejahteraan, sering pula menghancurkan adat dan pola pikiran yang penuh dengan makna.

Di negara yang berkembang dengan pesat muncul sikap mendua. Dari satu pihak mengagumi kekuasaan dan kemampuan ilmiah dan teknologis, dari lain pihak penyerapan teknologi dan informasi modern tanpa dicerna (biasanya pada generasi muda), dan ini berdampak dengan perlawanan yang dinyatakan oleh pembaruan adat lama (biasanya pada generasi tua).

Ketegangan antara ilmu dan ideologi memaksa orang menempatkan ilmu sebagai bagian rencana kerja sama pembangunan dalam konteks yang lebih luas. Bukan tugas yang ringan, karena hal itu hampir belum tercapai di dunia barat sekalipun sudah begitu lama dibentuk oleh ilmu-ilmu (Van Peursen, 1989).

Persoalan yang timbul ialah bagaimana mempertemukan ilmu dan ideologi sebagai entitas yang melayani kepentingan masyarakat dalam konteks pembangunan, dengan tanpa mengorbankan status keilmuan itu sendiri.

PEMBAHASAN

Pandangan Puritan-Elitis mengenai Ilmu

Kecenderungan puritan-elitis beranggapan bahwa tujuan akhir ilmu adalah demi ilmu itu sendiri. Ilmu memang bertujuan untuk mencari dan menemukan penjelasan, yaitu penjelasan yang benar tentang segala sesuatu. Bagi kaum puritan-elitis, kebenaran ilmiah dari penjelasan ilmiah ini terutama hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Ilmu bagi mereka dikembangkan hanya demi ilmu.

Kepuasan ilmuwan di sini terletak dalam menemukan teori-teori besar yang mampu menjelaskan segala persoalan, teka-teki dan gejala alam ini, terlepas dari apakah ilmu itu berguna atau tidak bagi kehidupan praktis manusia. Kecenderungan puritan-elitis, pembicaraan mengenai *link and match* tidak kena. Mereka tidak mempersoalkan aplikasinya bagi kehidupan konkret (Keraf, dan Mikhael Dua, 2001).

Pandangan puritan-elitis selalu ingin menempatkan ilmu sebagai entitas yang otonom dan objektif. Otonom, artinya ilmu sebagai problem (problem teori) tidak berada dalam pengertian dibuat (*sense made*), melainkan problem-problem itu

ditemukan (*discovered*) melalui kita, dan berdasarkan pengamatan ini sebelum problem-problem ditemukan, problem tersebut sudah ada (*exist*) (Popper, 1974). Ilmu berkembang berdasarkan prinsip-prinsipnya sendiri, terlepas dari kaidah-kaidah di luar ilmu. Keberadaan problem teori sifatnya *hidden*, atau tersembunyi dan sewaktu-waktu muncul dari teori itu. Objektif, artinya ilmu memiliki batas wilayah permasalahan yang jelas, melihat masalah sebagaimana adanya, menghindari faktor-faktor subjektivitas (emosi, keyakinan, perasaan).

Pandangan Sosiologis

Pandangan sosiologis cenderung menempatkan ilmu dalam konteks kepentingan masyarakat. Bagi kelompok ini, ilmu menjadi menarik justru karena ia berguna membantu manusia. Ilmu tidak ada artinya sama sekali tanpa kegunaannya bagi manusia atau masyarakat. Penjelasan dan kebenaran objektif ya!, tetapi kebenaran dan penjelasan itu punya arti justru karena berguna bagi kehidupan masyarakat.

Sosiologisme menganggap ilmu diatur oleh kekuatan-kekuatan sosial. Dalam lingkup kekuatan sosial orang harus memilih dan pilihan itu menguasai struktur intern ilmu. Ilmu sedemikian dirumuskan, mau tak mau telah berperan dalam masyarakat. Ilmu bukan sekedar untuk diketahui melainkan untuk merubah masyarakat Marxisme. Melayani masyarakat dapat menghasilkan pendirian ideologis, maksudnya ialah mengabdikan ilmu kepada pilihan yang ditentukan oleh pandangan dunia (wawasan) dan atau sosial politik

Sifat bebas nilai ternyata akan berbenturan dengan aliran-aliran konservatif, dan sebagai ilmu tidak akan mendorong ke arah perubahan masyarakat

yang amat diperlukan. Apa yang pada sosiologisme hanya bersifat deskriptif mengenai relativisme kebudayaan, dan juga terhadap cara bernalar ilmiah "fakta sosial" yang mengendalikan pandangan religius, sosial, dan ilmiah, sekarang menjadi preskriptif. Konsekuensinya orang harus ikut campur tangan secara aktif dalam masyarakat, juga lewat ilmu. Nilai dan *ugeran* susila, sosial, politis, meresap ke teras ilmu (Van Peursen, 1989).

Mengendalikan ilmu secara ideologis terjadi pada marxisme ortodoks (marxisme-leninisme). Marx amat berjasa dengan menunjuk konteks lebih luas lagi bagi kebenaran ilmiah. Bagi Marx, yang penting bukan kebenaran teoritis belaka, melainkan suatu kebenaran yang justru untuk kehidupan praktis. Dalam kaidahnya, objektivitas sejati adalah pemihakan yang sejati (*partymindedness*). Objektivitas hanya mungkin dalam kebersamaan suatu kelompok, tetapi arti sesungguhnya lebih bersifat ideologis, berdasarkan azas-azas ideologi dialektik materialistis. Suatu ilmu yang beranggapan dapat bersifat netral sesungguhnya menindas massa.

Pendirian ideologis keilmuan ini menimbulkan banyak konflik dengan ilmu, untuk sebagian dapat diatasi lewat tafsiran lebih luwes. Contoh, melalui penolakan terhadap teori relativitas umum. Karena dalam teori ini tersirat anggapan bahwa alam semesta berhingga, anggapan ini bertentangan dengan azas dasar kiamat bahwa materi tak berhingga (Van Peursen, 1989).

Dalam pandangan marxis, yang penting bukan pertanyaan ilmiah: teori mana yang betul, melainkan menjelaskan bahwa menaklukkan secara ideologis kedudukan ilmu yang khas dan sistematis dengan memaksakan kepada ilmu azas-azas yang diambil dari ideologi.

Pendirian lain yang luwes dianut oleh kebanyakan neo-marxis, walaupun

mereka mendukung pengaruh ideologis pada ilmu. Masalah pertama yang menonjol ialah anggapan dialektis mengenai kenyataan yang mengarahkan struktur ilmu. Anggapan ini terdapat pada mazhab Frankfurt, antara lain Th.W. Adorno, Habermas dan secara tidak langsung juga pada H. Marcuse. Dalam diskusi antara K. Popper dengan Adorno dinyatakan oleh Popper, bila "dialektik" dilihat sebagai azas pertentangan, maka ini harus dianggap sebagai keterbatasan ilmu yang selalu dapat diperbaiki lewat pertentangan. Adorno (1969) menyatakan sebaliknya, bahwa pertentangan menjadi dialektik terletak dalam barang itu sendiri, karena masyarakat sendiri sebagai bidang penelaahan ilmiah memperlihatkan pertentangan, kontradiksi dan konflik. Masalah kedua yang berkaitan dengan masalah pertama, ialah penilaian mengenai susunan masyarakat yang amat berperan (kebijakan politik), harus juga berpengaruh pada ilmu. Terhadap sifat bebas nilai ilmu, kata Popper bukan ilmuwan. Neomarxisme menekankan sifat taut nilai bagi semua ilmu.

Habermas dan Marcuse yang disitasi oleh Van Peursen (1989) menjabarkan pendapat ini dengan cara mereka sendiri. Habermas berbicara tentang "kepentingan yang menggiring pengetahuan" (*erkenntnisleitende Interessen*). Sains digiring oleh kepentingan teknologi, ilmu-ilmu sejarah oleh kepentingan praktis, dan ilmu-ilmu sosial oleh kepentingan emansipatoris.

Ilmu dalam Konteks Ideologi Pancasila

Pandangan sosiologis tersebut dalam perkembangannya mendorong timbulnya cara-cara pendekatan interdisipliner. Sedemikian pesatnya, nampak paradigma tentang kaidah kenetralan ilmu dan teknologi serta seni dewasa ini telah dilakukan kaji ulang berdasarkan perspektif interdisipliner,

terutama dari segi agama dan ilmu sosial kemanusiaan.

Dalam dekade abad ini, teknologi dan seni telah sadar bahwa sesungguhnya fanatisme tentang kaidah kenetralan ilmiah hanya akan menjebak dirinya kepada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidahnya sendiri. Ilmu dan teknologi memerlukan kerangka acuan di luar dirinya, khususnya mencakup pertimbangan ideologis (etis, religius, dan nilai-nilai budaya), yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia berbudaya (Soedjatmoko, 1984).

Pancasila sebagai ideologi memberi acuan bagi pengembangan ilmu di Indonesia, setidaknya dapat memberi kerangka dasar etika ilmu dan teknologi. Pancasila harus diolah dan dikembangkan secara ilmiah menjadi etika ilmiah. Lima prinsip dasar dalam Pancasila, sudah mencakup segala persoalan etik dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), yaitu :

(1). Monoteisme; (2). Humanitarianisme atau humanisme; (3). Nasionalisme dan solidaritas warga negara; (4). Demokrasi dan perwakilan; dan (5). Keadilan sosial, dengan interpretasi Indonesia dewasa ini (kontemporer).

Kelima prinsip tersebut kait mengkait dan merupakan kesatuan, sehingga menghasilkan pengertian yang luas dan komprehensif, seperti: manusia yang utuh, keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara individu, masyarakat dan lingkungan serta Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Jacob (1993), Sila Ketuhanan YME melengkapi ilmu menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan pusatnya dan tujuannya, serta menuntut tanggung

jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu. Ilmu dikembalikan pada fungsinya yang semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan atau sektor tertentu.

Sila persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan. Individualitas harus dijamin, tetapi tidak mengganggu integrasi.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu dan teknologi serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu dan teknologi haruslah demokratis.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles (distributif, kontributif dan komutatif) bagi pengembangan, pengajaran serta penerapan ilmu. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu.

SIMPULAN

Ilmu adalah suatu sistem dalam konteks, namun salah jika ilmu dilarutkan dalam konteks ideologi. Fungsi ilmu berubah sesuai lingkungan budaya dan konstelasi sosial. Dalam arti ini ilmu harus sanggup mengakui pengaruh timbal balik dari penilaian. Ilmu jangan sampai larut, karena ilmu merupakan perimbangan yang

berharga untuk menghadapi ideologi. Apabila ilmu larut dalam ideologi, maka kehilangan kritik diri.

Ketegangan ilmu dan ideologi hendaknya dipertahankan, karena dapat menjernihkan kedua belah pihak. Suatu ideologi, agama sekalipun dapat dibebaskan dari pernyataan-pernyataan yang terlalu dogmatis. Agama justru lebih lapang dan kurang terkait pada waktu, dibanding dengan ilmu. Sebaliknya, suatu ideologi dapat menyelamatkan ilmu menjadi semacam pandangan dunia atau agama. Kecondongan ini yang ingin menerangkan dan menguasai segala-galanya berdasarkan ilmu, disebut *saintisme*. Kecondongan ini sama dogmatisnya seperti ideologi yang ingin menguasai ilmu. Berkat ketegangan antara ilmu dan ideologi, sikap kritis dapat merangsang kedua-duanya.

Untuk mengatasi ketegangan maka Pancasila dalam kapasitasnya sebagai ideologi setidaknya mampu memberikan kerangka dasar etika ilmu bagi pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adorno, Th., W. 1969. *Der Positivismuss treit in der Deutshen Soziologie*, Neuwied, Berlin.
- Jacob, T. 1993. *Manusia, Ilmu dan Teknologi*. PT. Tiara Wacana, Yogya
- Popper, Karl, R. 1974. *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Keraf, S. A., dan Mikhael Dua. 2001. *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soejatmoko. 1984. *Masalah Ilmu Pengetahuan, Sekitar Teknologi dan Dimensi Moral*, Gramedia, Jakarta.
- Van Peursen, C.A. 1989. *Susunan Ilmu Pengetahuan P.T.* Gramedia, Jakarta.